

Sitti Amnah Rizky Ridhoallah, 2022. **Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah.** Skripsi. Universitas Khairun.

Pembimbing I : Amirudin Umasangaji, S.H., M.H.

Pembimbing II : Yahya Yunus, S.H., M.H.

### **ABSTRAK**

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah (Studi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate, (Di bawah bimbingan Amirudin Umasangaji, S.H., M.H. selaku pembimbing I, Yahya Yunus, S.H., M.H. selaku pembimbing II). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Ternate, serta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan teknik pengumpulan data kepustakaan (library research) dan studi lapangan (field research). Data dilengkapi dengan data primer dari hasil wawancara dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate, dan data sekunder dari berbagai referensi (buku, artikel, jurnal, karya ilmiah, media cetak, majalah dan website). Data yang diperoleh dan dikumpulkan dianalisis dengan teknik kualitatif deskriptif, yaitu analisis data hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif kemudian hasilnya akan diuraikan secara deskriptif yakni peneliti berusaha menganalisis untuk memberikan

gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sehingga menghasilkan analisis yang objektif untuk menjawab permasalahan. Kemudian dari analisis data itu ditarik sebuah kesimpulan

Adapun temuan yang didapatkan dari hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat serta Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2020. Berdasarkan pada pasal 32 ayat (1) Peraturan DPRD Kota Ternate No. 1 tahun 2020, pengawasan DPRD diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Faktor penghambat pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Ternate terhadap kebijakan Pemerintah Daerah Kota Ternate adalah masih minimnya kemampuan dan kompetensi sebagian anggota DPRD, dan masih rendahnya pemahaman pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD oleh para anggota. Faktor pendukung pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Ternate terhadap kebijakan Pemerintah Daerah Kota Ternate adalah keterbukaan dan ketersediaan media yang dapat memfasilitasi dan mempublikasikan bentuk-bentuk dari hasil pengawasan DPRD Kota Ternate.

Kata kunci : Fungsi Pengawasan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sitti Amnah Rizky Ridhoallah, 2022, Implementation of the Supervisory Function of the Regional House of Representatives on Government Policies Region (Study at the Ternate City Regional House of Representatives). Essay. Ternate. Khairun University

#### ABSTRACT

Advisor I : Amirudin Umasangaji, S.H., M.H.

Advisor II : Yahya Yunus, S.H., M.H.

ABSTRACT: Implementation of the Supervisory Function of the Regional House of Representatives on Government Policies Region (Study at the Ternate City Regional House of Representatives), (Under the guidance of Amirudin Umasangaji, S.H., M.H. as supervisor I, Yahya Yunus, S.H., M.H. as supervisor II). This study aims to find out how implementation of the supervisory function of the Ternate City Regional House of Representatives on Policies Ternate City Government, as well as to find out what factors influence implementation of the supervisory function. The type of research used is legal research empirical, with library data collection techniques (library research) and field studies (field research). Data is complemented by primary data from interviews with members of the House of Representatives Local People of Ternate City, and secondary data from various references (books, articles, journals, works science, print media, magazines and websites). The data obtained and collected were analyzed by descriptive qualitative technique, namely the analysis of research data using the approach qualitatively then the results will be described descriptively, namely the

researcher tries to analyze to provide an overview or explanation of the subject and object of research so as to produce objective analysis to answer the problem.

Then from the data analysis, it is drawn a conclusion

The findings obtained from the results of the study show that the implementation of the function DPRD supervision is carried out based on statutory provisions, especially Regulations Government Number 12 of 2018 concerning Guidelines for the Preparation of the Rules of Conduct for the House of Representatives and Regulation of the Regional House of Representatives of Ternate City Number 1 of 2020. Based on the Article 32 paragraph (1) of Ternate City DPRD Regulation No. 1 of 2020, the supervision of the DPRD is realized in the form of supervision on the implementation of Regional Regulations and Mayor Regulations, supervision on the implementation of laws and regulations related to the administration of government regions, as well as supervision of the follow-up to the results of the Supreme Audit Agency's examination. Factor an obstacle to the implementation of the supervisory function of the Ternate City DPRD against government policies Ternate City area is the lack of ability and competence of some DPRD members, and there is still a low understanding of the implementation of the duties and functions of DPRD by members. Supporting factors implementation of the supervisory function of the Ternate City DPRD on the policies of the City Regional Government Ternate is the openness and availability of media that can facilitate and publish forms of the results of the supervision of the Ternate City DPRD.

Keywords: Supervision Function, Regional People's Representative Council

